

# PENGARUH OPINI AUDIT DAN TEMUAN AUDIT TERHADAP TINGKAT KORUPSI PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA (Studi Empiris pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah Tahun 2015- 2020)

Imam Panji, Dwi Cahyo Utomo<sup>1</sup>

Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro  
Jl. Prof Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone; +622476486851

## ABSTRACT

*This study aims to test and find out the effect of audit opinions and audit findings on the level of corruption in local governments in Central Java Province. The research data used is secondary data from Central Java BPK Website, the annual audit report (LHP), and the Central Java High Court. This study uses multiple linear regression analysis to test the correlation between audit opinion and audit findings on the level of corruption. The test results individually prove that audit opinion has a negative effect on the level of corruption, and audit findings have no effect on the level of corruption in the district or city government in Central Java Province.*

*Keywords: Corruption, Audit Opinion, Audit Finding, Local Government.*

## PENDAHULUAN

Berdasarkan laporan tahunan *Indonesia Corruption Watch (ICW)* (2022) selama tahun 2016-2022 terjadi 109 fenomena tindak pidana korupsi di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 47 triliun. Dalam Suyatmiko (2021) Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada tahun 2020 sebesar 40/100 yang menempatkan Indonesia pada peringkat ke-102 dari 180 negara, dan peringkat ke-5 dari 11 negara ASEAN.

Menurut penelitian Owusu, Chan, dan Shan (2017) korupsi disebabkan oleh sifat serakah, kurangnya pengawasan yang ketat, dan adanya teladan yang tidak baik, serta sanksi terhadap tindakan korupsi kurang memadai yang pada akhirnya akan merusak nilai-nilai dan tatanan sosial, menghambat pengambilan keputusan, menurunkan kualitas produk, mengurangi usia ekonomis produk, merenggut harta rakyat, serta memberikan dampak menghancurkan lainnya. Sejalan dengan hal tersebut, Agbo dan Aruomoaghe (2014) menyatakan bahwa korupsi dapat menyebabkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) terhambat sehingga mengganggu permodalan negara, menurunkan kualitas layanan publik dan pendapatan negara, memperburuk kualitas pendidikan, kualitas kesehatan, kualitas sarana dan prasarana publik, serta menciptakan inefektivitas pembangunan dan menyebabkan ketimpangan pendapatan dan kemiskinan. Lalu Asiedu dan Deffor (2017) menjelaskan korupsi dapat meruntuhkan kepercayaan masyarakat di berbagai lembaga negara yang berujung pada lemahnya kemampuan negara dalam memerangi maladministrasi dalam perekonomian.

Untuk memerangi hal tersebut, Assakaf, Samsudin, dan Othman (2018) menyatakan bahwa diperlukan prosedur audit sektor publik sebab audit dapat berperan untuk memberikan informasi yang independen, objektif, serta andal berdasarkan bukti. Audit sektor publik dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan efektivitas lembaga publik, serta menciptakan perubahan dengan analisis komprehensif dan

---

<sup>1</sup> Corresponding author

---

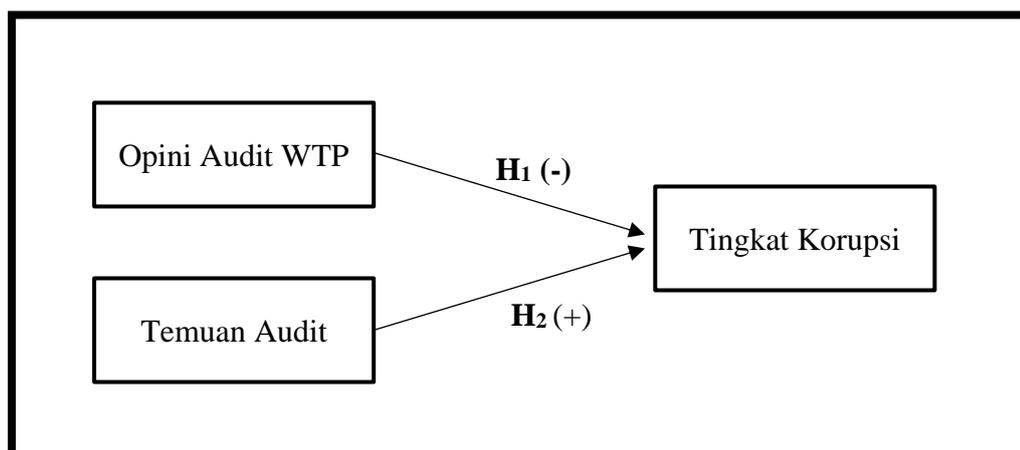
rekomendasi perbaikan. Penelitian Jeppesen (2019) juga menjelaskan hal serupa bahwa audit memiliki peran dalam mencegah tindakan korupsi sebab audit dapat memberikan pengawasan terhadap pengendalian internal organisasi. Audit menjadi elemen kunci memerangi korupsi karena fokus utama audit internal dapat menemukan celah-celah korupsi dalam sebuah organisasi. Sedangkan riset Lino, et al (2022) menjelaskan bahwa lembaga sejenis BPK di Brazil yaitu *Courts of Account (CoA)* juga memiliki peran penting dalam memerangi korupsi yang terjadi di sebuah negara. CoA memiliki tanggung jawab untuk mengawasi pengeluaran dana publik dan tingkat kepatuhan terhadap hukum yang berlaku, CoA memegang peranan dalam mengendalikan dan memerangi korupsi, memberikan kesadaran terhadap masyarakat terkait temuan audit, dan memastikan seluruh pejabat publik tidak melanggar, patuh, serta bertindak sejalan perundang-undangan dalam bertugas.

Opini audit dalam Malau, et al (2019) dijelaskan sebagai kesimpulan dari prosedur identifikasi auditor terhadap laporan keuangan. Opini audit dapat menjadi metode penilaian terhadap efektivitas entitas dan menilai transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan. Lalu Otor dan Eya (2013) dalam Agbo dan Aruomoaghe (2014) menyatakan bahwa temuan audit dapat menjadi indikasi terjadinya kecurangan dalam sebuah perusahaan, seperti jika ada pembengkakan biaya, pembelian berlebih, dan pelayanan yang buruk, hal tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut.

Pada penelitian terdahulu yang mengulas tema yang serupa seperti penelitian Suhardjanto, et al (2018) membuktikan bahwa opini audit berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi pada pemerintah provinsi di Indonesia, sebab opini audit adalah salah satu cerminan akuntabilitas pemerintah dalam menjalankan pemerintahan. Namun penelitian Budiman dan Amyar (2021) menyatakan opini audit tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi sebab opini auditor hanyalah penilaian laporan keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Berdasarkan inkonsistensi penelitian terdahulu maka dilakukan penelitian ini untuk memperoleh bukti empiris pengaruh opini audit dan temuan audit terhadap tingkat korupsi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2015-2020.

### KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Teori Klitgaard adalah teori persamaan tindakan korupsi yang dicetuskan oleh Robert Klitgaard (1991). Klitgaard mengemukakan terdapat tiga faktor yang dapat mempengaruhi tindakan korupsi, yaitu kekuasaan (*discretion*), monopoli (*monopoly*), dan dapat dikurangi dengan adanya akuntabilitas (*accountability*). Sehingga jika seseorang memiliki kuasa terhadap barang atau jasa kemudian mempunyai kewenangan untuk menetapkan yang mendapatkan barang atau jasa tersebut dan jumlahnya, serta tidak ada penerapan akuntabilitas, maka kemungkinan korupsi akan terjadi. Hal ini diperkuat Lind dan Rabe-Hemp (2017) bahwa akuntabilitas adalah kemampuan untuk mengurangi peluang terjadinya korupsi, maladministrasi, dan ketidakwajaran hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkuasa. Kerangka pemikiran penelitian digambarkan sebagai berikut:



### **Opini Audit terhadap Tingkat Korupsi di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 opini audit dikategorikan menjadi empat jenis, diantaranya wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), tidak wajar (*adversed opinion*), serta pernyataan menolak mengeluarkan opini (*disclaimer of opinion*). Setiap opini auditor mencerminkan kewajaran yang merepresentasikan tingkat pertanggungjawaban laporan keuangan yang dapat menutup dan mempersempit celah-celah terjadinya kecurangan.

Hubungan antara opini audit dengan tingkat korupsi sudah diuji pada penelitian Suhardjanto, et al (2018) yang membuktikan opini audit berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi pada pemerintah provinsi di Indonesia. Hal ini dikarenakan opini audit dapat menjadi sarana mengukur akuntabilitas dalam menjalankan aktivitas pemerintahannya. Oleh sebab itu, hipotesis yang disusun sebagai berikut:

**H<sub>1</sub>: Opini audit WTP berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.**

### **Temuan Audit terhadap Tingkat Korupsi di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah**

Anderson, et al (2017) mendefinisikan temuan audit sebagai fakta yang menunjukkan bahwa terdapat kekurangan pada laporan keuangan entitas yang berkaitan dengan aspek manajemen risiko, informasi analitis, serta rekomendasi sebagai evaluasi yang dapat dilakukan manajemen untuk mengoptimalkan kualitas laporan keuangan dan pengendalian internal. Temuan audit lembaga publik dapat menunjukkan dua jenis diantaranya temuan kekurangan sistem pengendalian internal serta temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan.

Menurut penelitian Asiedu dan Deffor (2017) menemukan bahwa pelaksanaan Undang-Undang 658 (UU 658) mengenai audit internal memiliki dampak yang signifikan terhadap kasus korupsi pada lembaga sektor publik di Ghana. Pelaksanaan audit internal yang efektif akan menghasilkan temuan audit yang memungkinkan auditor untuk menemukan aktivitas-aktivitas tersembunyi, dan mencari tahu potensi-potensi kecurangan di dalam lembaga publik. Oleh sebab itu, hipotesis yang disusun sebagai berikut:

**H<sub>2</sub>: Temuan audit berpengaruh positif terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.**

## **METODE PENELITIAN**

### **Variabel Penelitian**

Penelitian ini menggunakan variabel dependen yaitu tingkat korupsi. Lalu variabel independen yang digunakan yaitu opini audit, dan temuan audit.

**Tabel 1**  
**Variabel dan Pengukuran**

<b>Variabel</b>	<b>Pengukuran</b>
Tingkat Korupsi	Jumlah kasus korupsi dalam tahap penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.
Opini Audit	Poin 2 untuk opini audit WTP dan poin 1 untuk opini audit selain WTP.
Temuan Audit	Jumlah temuan audit sistem pengendalian internal dan temuan terhadap kepatuhan terhadap perundangan.
Ukuran Pemerintahan	Realisasi belanja daerah dibagi dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

### Penentuan Sampel

Penelitian ini menggunakan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan rekap kasus korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kualifikasi penetapan sampel penelitian adalah:

1. Pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah yang memperoleh opini audit, serta temuan audit dari BPK RI.
2. Pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah yang terdapat kasus korupsi berdasarkan data Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.
3. Ketersediaan data yang memadai untuk seluruh variabel pada rentang waktu 2015-2020.

### Metode Analisis

Ghozali (2021) menjelaskan metode analisis regresi linier berganda dapat berfungsi untuk menganalisis hubungan atau korelasi secara linier antara satu variabel dependen dengan dua variabel independen atau lebih. Formula persamaan antara variabel tersebut dijabarkan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{CORRUPT} = \alpha + \beta_1 \text{AUOPI} + \beta_2 \text{AUFIN} + \beta_3 \text{GOVSIZE} + \varepsilon$$

Keterangan:

- CORRUPT : Tingkat Korupsi  
 $\alpha$  : Konstanta  
 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$  : Koefisien Regresi  
AUOPI : Opini Audit  
AUFIN : Temuan Audit  
GOVSIZE : Ukuran Pemerintahan  
 $\varepsilon$  : Error (kesalahan pengganggu)

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Deskripsi Objek Penelitian

Peneliti berfokus untuk mencari tahu korelasi serta hubungan dari opini audit, dan temuan audit terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah, khususnya di Provinsi Jawa Tengah. Sehingga populasi penelitian adalah pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah pada rentang 2015-2020 sejumlah 35 Kabupaten/Kota. Sehingga jumlah populasi penelitian adalah 210 data.

**Tabel 2**  
**Sampel yang Memenuhi Kualifikasi**

Kriteria Sampel	Jumlah Kabupaten dan Kota
Total Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah x 6 tahun	210
Kabupaten dan Kota tidak ada kasus korupsi pada tahun 2015-2020	(5)
Data <i>outlier</i> (ekstrem)	(5)
Jumlah sampel akhir penelitian	200

Sumber: Data diolah (2023)

Berdasarkan tabel 2, terdapat 5 Kabupaten/Kota yang tidak memiliki kasus korupsi pada tahun berjalan berdasarkan data Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Kemudian juga

terdapat 5 Kabupaten/Kota yang memiliki data ekstrem sehingga tidak digunakan menjadi sampel penelitian.

### Statistik Deskriptif

Hasil uji statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel 3 yang disajikan sebagai berikut:

**Tabel 3**  
**Statistik Deskriptif**

	N	Min	Max	Mean	Std. Dev
AUOPI	200	1,00	2,00	1,8800	,32578
AUFIN	200	2,00	21,00	5,6600	3,50511
CORRUPT	200	1,00	17,00	5,9800	3,21735
GOVSIZE	200	17,45	153,98	85,5748	28,35115
Valid N (listwise)	200				

Sumber: Data diolah (2023)

### Hasil Uji Asumsi Klasik

Pada uji normalitas yang diolah menggunakan metode statistik *one sample Kolmogorov-smirnov* menunjukkan nilai signifikansi 0,113 sehingga lebih dari 0,05. Sehingga, dengan nilai signifikansi tersebut dapat diindikasikan bahwa nilai residual terdistribusi secara normal yang dapat dilihat pada tabel 4. Selanjutnya dilkaukan uji multikolinieritas pada model regresi seperti yang tersaji pada tabel 5. Hasilnya menunjukkan bahwa untuk keseluruhan variabel memiliki nilai *tolerance* lebih dari 0,1 dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) kurang dari 10, sehingga dinyatakan model regresi penelitian tidak mengalami gejala multikolonieritas. Kemudian untuk uji autokorelasi ditetapkan menggunakan metode *Durbin Watson (DW Test)* yang hasilnya ditampilkan pada tabel 6 dengan nilai *Durbin-Watson* sebesar 1,835. Dengan sampel berjumlah 200 dan konstanta berjumlah 3, maka didapati nilai DU adalah 1,7990 dan nilai 4-DU adalah 2,201. Sehingga nilai DW terletak di antara nilai DU dan 4-DU ( $1,7990 < 1,835 < 2,201$ ) sehingga model regresi tidak mengalami gejala autokorelasi. Selanjutnya untuk mendeteksi gejala heterokedastisitas ditetapkan menggunakan metode *Spearman's Rho* yang hasilnya diperlihatkan pada tabel 7. Hasil uji menunjukkan untuk ketiga variabel memperoleh nilai signifikansi lebih dari 0,05 sehingga model regresi tidak mengalami gejala heteroskedastisitas.

**Tabel 4**  
**Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov**

	<i>Unstandardized Residual</i>
N	200
Kolmogorov-Smirnov Z	1,198
Asymp. Sig (2-tailed)	,113

Sumber: Data diolah (2023)

**Tabel 5**  
**Hasil Uji Multikolonieritas**

Model	Tolerance	VIF
AUOPI	,964	1,038
AUFIN	,947	1,056
GOVSIZE	,958	1,044

Sumber: Data diolah (2023)

**Tabel 6**  
**Hasil Uji Auto Korelasi**  
**Durbin-Watson**  
 1,835

Sumber: Data diolah (2023)

**Tabel 7**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Variabel	Sig. (2-tailed)
AUOPI	,664
AUFIN	,608
GOVSIZE	,996

Sumber: Data diolah (2023)

### Hasil Uji Hipotesis

Pelaksanaan Uji F dimaksudkan untuk mencari tahu signifikansi pengaruh seluruh variabel independen secara bersamaan (simultan) terhadap variabel dependen. Variabel independen dinyatakan signifikan dan berpengaruh terhadap variabel dependen jika memiliki signifikansi kurang dari 0,05. Hasil uji secara simultan menunjukkan nilai F hitung > F tabel (3,363 > 2,65) dan memiliki nilai signifikansi 0,02 sehingga kurang dari 0,05. Sehingga variabel independen opini audit, dan temuan audit secara bersamaan memiliki pengaruh terhadap tingkat korupsi di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya, untuk uji hipotesis t dilaksanakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Dasar pengambilan keputusannya adalah jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Hasil uji hipotesis t ditampilkan dalam tabel 8 berikut:

**Tabel 8**  
**Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)**

Model	B	t	Sig.
(Constant)	9,184	5,654	,000
AUOPI	-1,587	-2,265	,025
AUFIN	,116	1,770	,078
GOVSIZE	-,010	-1,272	,205

Sumber: Data diolah (2023)

Berdasarkan tabel 8, maka persamaan model regresi adalah:

$$\text{CORRUPT} = 9,184 - 1,587\text{AUOPI} + 0,116\text{AUFIN} - 0,10\text{GOVSIZE} + \epsilon$$

### Pengaruh Opini Audit terhadap Tingkat Korupsi

Berdasarkan pengolahan dan uji data sampel yang tertera pada tabel 8, didapati nilai t hitung sebesar -2,265 dan signifikansi sebesar 0,025. Dengan hasil tersebut, disimpulkan opini audit memiliki pengaruh terhadap tingkat korupsi, sehingga hipotesis ke-1 (H<sub>1</sub>) diterima. Hasil ini sesuai dengan penelitian Suhardjanto, et al (2018) yang membuktikan bahwa opini auditor adalah salah satu tolok ukur untuk menilai akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah dalam menjalankan aktivitas pemerintahan. Hasil uji ini juga selaras dengan teori Klitgaard bahwa akuntabilitas yang salah satunya proses audit sektor publik yang dalam hal ini memiliki hasil opini audit, dapat menjadi peredam diskresi dan monopoli kekuasaan.

Namun hasil ini tidak selaras dengan penelitian Budiman dan Amyar (2021) yaitu opini audit tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi di kementerian Indonesia. Sebab opini audit yang baik tidak dapat menjamin sebuah lembaga bebas dari tindak pidana

korupsi, karena opini audit diterbitkan hanya berdasarkan kesesuaian pengungkapan serta penyajian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

### **Pengaruh Temuan Audit terhadap Tingkat Korupsi**

Berdasarkan pengolahan dan uji data sampel yang tertera pada tabel 8, didapati nilai  $t$  hitung sebesar 1,770 dengan nilai signifikansi 0,078. Dengan hasil tersebut, disimpulkan temuan audit tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat korupsi, sehingga hipotesis ke-2 ( $H_2$ ) ditolak. Hasil ini sejalan dengan penelitian Masyitoh, et al (2015) yang menemukan temuan audit terhadap SPI tidak dapat menjadi cerminan tindakan korupsi sebuah lembaga, sebab temuan audit SPI hanya mengindikasikan perlunya perbaikan tatanan SPI dalam sebuah lembaga, dan optimalisasi dalam pelaksanaannya. Hasil ini tidak sejalan dan mendukung teori Klitgaard bahwa akuntabilitas berbentuk proses audit sektor publik tidak sepenuhnya dapat meredam diskresi dan monopoli kekuasaan. Sebab temuan audit yang ada belum tentu mengindikasikan adanya tindakan kecurangan sehingga tingkat korupsi menjadi tinggi.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Suhardjanto, et al (2018) yang membuktikan temuan audit dapat menjadi indikasi tingkat korupsi yang tinggi. Hal ini dapat diketahui dari temuan audit SPI yang menunjukkan adanya celah dan kelemahan. Kelemahan tersebut dapat dimanfaatkan menjadi sebuah potensi dan peluang melakukan aksi kecurangan.

### **Pengaruh Variabel Kontrol Ukuran Pemerintahan terhadap Tingkat Korupsi**

Variabel kontrol penelitian diukur dengan membagi realisasi belanja Kabupaten/Kota pada tahun berjalan dengan PDRB. Sehingga semakin besar ukuran pemerintahan maka semakin besar pula realisasi belanja sebuah daerah. Berdasarkan uji data pada tabel 8 didapati nilai  $t$  hitung adalah -1,272 dengan signifikansi sebesar 0,205. Sehingga dengan hasil tersebut disimpulkan bahwa ukuran pemerintahan tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat korupsi. Hasil ini sejalan dengan penelitian Suhardjanto, et al (2018) dan Masyitoh, et al (2015) yang secara konsisten membuktikan ukuran pemerintahan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat korupsi, sebab besarnya anggaran belanja sebuah pemerintah daerah tidak dapat berperan menjadi indikator dasar bahwa sebuah pemerintah daerah memiliki tingkat korupsi yang tinggi.

Sedangkan hasil ini kontras dengan riset Liu dan Lin (2012) yang menemukan ukuran pemerintahan memiliki arah hubungan yang positif terhadap tingkat korupsi. Sebab, ukuran pemerintahan yang diukur dengan realisasi belanja terhadap PDRB jika hasilnya semakin besar, maka realisasi belanja yang dikeluarkan semakin besar pula. Hal tersebut dapat menjadi indikasi peluang terjadinya penyelewengan dan kecurangan terhadap anggaran yang berdampak pada meningkatnya kasus korupsi.

### **KESIMPULAN**

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa opini audit memiliki pengaruh terhadap tingkat korupsi, sedangkan temuan audit tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam penggunaan variabel, yaitu hanya dua variabel independen dan satu variabel kontrol yang berdampak pada hasil uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) dengan nilai *Adjusted R Square* hanya 3,4%. Lalu penelitian ini hanya terbatas di lingkup Kabupaten/Kota di Jawa Tengah saja serta tahun 2015-2020 saja. Harapannya ke depan BPK dapat melakukan prosedur audit yang lebih mendalam dan komprehensif sehingga temuan audit yang ada dapat mengindikasikan adanya tindakan kecurangan dalam sebuah lembaga. BPK juga dapat bekerja sama dengan KPK sebagai perwujudan untuk mencegah tindak pidana korupsi. Kemudian untuk penelitian di masa yang akan datang dapat menggunakan variabel independen yang lebih variatif sebab masih ada 96,6% variabel yang potensial dalam memprediksi korupsi seperti tingkat pertumbuhan ekonomi (Masyitoh, et al

2015), pengendalian internal dan reformasi birokrasi (Budiman dan Amyar, 2021), dan diskresi manajemen (Jeppesen, 2019). Dapat juga mengubah model penelitian serta menambahkan variabel moderasi atau variabel penghubung. Kemudian juga dapat dilakukan pengujian pada provinsi dan rentang waktu lainnya sehingga dapat diketahui apakah daerah lain berbanding lurus atau bertolak belakang dengan realita di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

## REFERENSI

- Agbo, S. dan J.A. Aruomoaghe. 2014. "Performance Audit: A Tool for Fighting Corruption in the Nigeria's Public Sector Administration". *International Journal of Management and Sustainability*, Vol. 3, h. 374-383.
- Anderson, U.L., M.J. Head., S. Ramamoorti., C. Riddle., M. Salamasick. dan P.J. Sobel. 2017. *Internal Auditing Assurance & Advisory Services*. 4 ed. Florida: Internal Audit Foundation.
- Asiedu, K.F. dan E.W. Deffor. 2017. "Fighting Corruption by Means of Effective Internal Audit Function: Evidence from the Ghanaian Public Sector". *International Journal of Auditing*, Vol. 21, h. 82-99.
- Assakaf, E.A., R.S. Samsudin. dan Z. Othman. 2018. "Public Sector Auditing and Corruption: A Literature Review". *Asian Journal of Finance & Accounting*, Vol. 10, h. 226-241.
- Budiman, A.M. dan F. Amyar. 2021. "The Effect of Audit Opinions, Implementation of Audit Recommendations, and Finding of State Losses on Corruption Levels within Ministries and Institutions in the Republic of Indonesia". *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, Vol. 7, h. 113-124.
- Ghozali, I. 2021. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Indonesia Corruption Watch. 2022. *Tren Penindakan Kasus Korupsi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 2016-2021*, Jakarta.
- Jeppesen, K.K. 2019. "The Role of Auditing in Fight Againsts Corruption". *The British Accounting Review*, Vol. 51, h. 1-19.
- Klitgaard, R.E. 1991. *Controlling Corruption*, California: University of California Press.
- Lind, N.S. dan C.E. Rabe-Hemp. 2017. *Corruption, Accountability and Discretion*, Bingley: Emerald Publishing Limited.
- Lino, A.F., R.R. de Azevedo., A.C.B. de Aquino. dan I. Steccolini. 2022. "Fighting or Supporting Corruption? The Role of Public Sector Audit Organizations in Brazil". *Critical Perspective on Accounting*, Vol. 83, h. 1-19.
- Liu, J. dan B. Lin. 2012. "Government Auditing and Corruption Control: Evidence from China's Provincial Panel Data". *China Journal of Accounting Research*, Vol. 5, h. 163-186.
- Malau, W.C., P. Ohalehi., E.S. Badr. dan K. Yekini. 2019. "Fraud Interpretation and Disclaimer Audit Opinion: Evidence from the Solomon Islands Public Sector (SIPS)". *Managerial Auditing Journal*, Vol. 36, h. 240-260.
- Masyitoh, R.D., R. Wardhani. dan D. Setyaningrum. 2015. "Pengaruh Opini Audit, Temuan Audit, dan Tindak Lanjut Hasil Audit terhadap Persepsi Korupsi pada Pemerintah Daerah Tingkat II Tahun 2008-2010". *In Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia*, Jakarta (Vol.18).
- Owusu, E.K., A.P.C. Chan. dan M. Shan. 2017. "Causal Factors of Corruption in Construction Project Management: An Overview". *Science and Engineering Ethics*, Vol. 25, h. 1-31.



- Suhardjanto, D., M. Syafruddin., R.P. Andini. dan M.W. Rahmatika. 2018. “Accountability and Corruption Level of Provincial Government in Indonesia”. *Review of Integrative Business & Economics*, Vol. 7, h. 281-296.
- Suyatmiko, W.H. 2021. “Memaknai Turunnya Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2020”. *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi*, Vol. 7, h. 161-178.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.